

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN SEBAGAI POTENSI MINAWISATA DI KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

Anis Khoirunnisa^{1(a)}, Moh. Taufik Hidayat^{2(b)}, Ipik Permana^{3(c)}, Ali Aminulloh^{4(d)},
Muhammad N. Abdurrazaq^{5(e)}, Iis Susiawati^{6(f)}

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Swadaya Gunung Jati

^{4,5,6}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia

^{a)}bungayasminmyprincess@gmail.com, ^{b)}mohtaufikhidayat638@gmail.com,

^{c)}ipermana44@gmail.com, ^{d)}aminulloh@iai-alzaytun.ac.id, ^{e)}kholish@iai-alzaytun.ac.id,

^{f)}iis.susiawati@iai-alzaytun.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article History:

Dikirim:

30-05-2023

Diterbitkan Online:

01-03-2024

Kata Kunci:

Kebijakan Pemerintah,
Pengembangan Kawasan,
Minawisata, Minapolitan

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Indramayu dalam mengembangkan kawasan minapolitan yang berpotensi menjadi kawasan minawisata, belum optimal. Hal ini menyebabkan potensi minapolitan yang dimiliki Indramayu belum dapat mendorong industri minawisata untuk meningkatkan pendapatan daerah Indramayu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, faktor pendorong dan penghambat yang terjadi, serta strategi dan upaya yang dilakukan. Data dari jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan tiga langkah, yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan: 1) implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata di kabupaten Indramayu belum optimal sebagaimana dilihat dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan yang belum terpenuhi dengan baik yaitu aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; 2) faktor yang mendukung kebijakan ini adalah adanya sumber daya alam yang potensial dan kekayaan budaya lokal, dan faktor yang menghambat adalah masalah kualitas SDM, infrastruktur, kurangnya peraturan daerah dan perangkat hukum pada tataran teknis pelaksanaannya, anggaran, kesadaran masyarakat, teknologi, dan media informasi publik; 3) upaya yang dilakukan pemerintah daerah menuangkan pengembangan minawisata pada rencana pembangunan daerah dan mengomunikasikannya pada pihak-pihak terkait. Pihak pengusaha minapolitan melakukan modernisasi produksi garam sehingga memiliki daya tarik pariwisata. Sedangkan upaya masyarakat adalah melakukan aksi nyata melakukan penataan daerah, pembersihan limbah-limbah sehingga menarik wisatawan untuk datang ke daerahnya.

Keywords:

Government Policy, Regional
Development, Minawisata,
Minapolitan

Corresponding Author:

iis.susiawati@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Indramayu local government policy in developing the Minapolitan area which has the potential to become a Minawisata area has not been optimal. This causes the minapolitan potential of Indramayu to not be able to encourage the tourism industry to increase Indramayu regional income. The purpose of this study is to determine the implementation of policies in the development of the Minapolitan area as a potential for tourism in Losarang District, Indramayu Regency, the driving and inhibiting factors that occur, as well as the strategies and efforts made. Data from this type of case study research with qualitative methods were obtained through

literature and field studies, with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. Data were analyzed using qualitative analysis with three steps, namely data reduction, presentation, and verification. The results of the study show: 1) the implementation of the policy for the development of the minapolitan area as a potential for tourism in Indramayu district is not optimal as seen from the dimensions of policy implementation which have not been fulfilled properly, namely aspects of policy communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure; 2) factors that support this policy are potential natural resources and local cultural wealth, and inhibiting factors are problems with the quality of human resources, infrastructure, lack of regional regulations and legal instruments at the technical level of implementation, budget, public awareness, technology and media public information; 3) the efforts made by the local government to include the development of Minawisata in the regional development plan and communicate it to related parties. Minapolitan entrepreneurs are modernizing salt production so that it has a tourism appeal. While the community's efforts are to take real action to organize the area, clean up waste so that it attracts tourists to come to their area.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i1.681>

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua per tiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (+ 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia (Negara et al., 2021). Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu wilayah dengan kondisi ekologis dan geografis yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan kelautan yang menyeluruh meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan kelautan dan produksi garam rakyat. Dengan potensi yang dimiliki, maka Kabupaten Indramayu memiliki kontribusi perikanan dan kelautan terbesar di Propinsi Jawa Barat. Yaitu kegiatan perikanan tangkap meliputi penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.

Kegiatan budidaya perikanan meliputi budidaya ikan di tambak air payau, budidaya ikan di kolam air tawar dan budidaya ikan di laut. Kegiatan pengolahan hasil perikanan dan kelautan menjadi faktor pendorong upaya peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu. Kegiatan produksi garam rakyat merupakan daerah penghasil produksi garam terbesar di Jawa Barat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menetapkan Sasaran Strategis (SS) dalam Rencana Strategis 2021-2024 diantaranya yakni: kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara sektor kelautan dan perikanan (KP) meningkat, ekonomi sektor KP meningkat, sumberdaya KP yang berkelanjutan, juga pengelolaan sumberdaya KP melalui tatakelola yang bertanggung jawab dan industrialisasi KP yang memiliki daya saing (KemenKKP-RI, 2021). Peningkatan produksi kelautan dan perikanan diupayakan agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan serta pembudidaya ikan. Peningkatan pendapatan ini merupakan salah satu isu strategis daerah dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor daya beli. Pembangunan sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu program unggulan daerah di Kabupaten Indramayu.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki arah kebijakan umum yang bersinergi dengan gagasan atau kebijakan KKP-RI dengan menempatkan peningkatan produksi sektor perikanan dan kelautan. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Indramayu meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, produksi garam rakyat dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Berdasarkan karakteristik wilayah, penggunaan lahan, topografi, hidrologi, klimatologi, dan geologi, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Indramayu berpotensi besar

dalam budidaya pertanian, perikanan, garam, agropolitan, minapolitan, agrowisata, ekowisata, minawisata, dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan (Pemkab-Indramayu, 2021). Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang sangat besar yang belum digarap secara maksimal. Potensi tersebut diantaranya, Sumber Daya Alam (SDA daratan) di atasnya lahan pertanian dan bawahnya kandungan minyak dan gas (migas). SDA kelautan yakni perikanan dan pariwisata pantai. Khususnya potensi SDA laut dan ikan yang ada di Indramayu harus digali dan dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan Indramayu dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Barat dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dari sektor kelautan dan perikanan, Indramayu memberikan kontribusi 61 % produksi perikanan di Jawa Barat. Pada tahun 2021 produksi ikan tangkap di Jawa Barat mencapai 185.946 ton. Pada tahun tersebut, produksi ikan tangkap Indramayu mencapai 113.011 ton (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021). Selain produksi ikan tangkap terdapat produksi perikanan lainnya seperti ikan tambak, kolam air tawar, perairan umum, budidaya laut. Merujuk data Diskanla Kabupaten Indramayu, sepanjang Januari-Desember 2021, total produksi perikanan mencapai Rp. 526.792,97 ton. Nilai produksi olahan konsumsi hasil perikanan mencapai Rp. 3.338.841.600.000,-. Dari kegiatan produksi perikanan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke Pemerintah daerah Indramayu ini mencapai Rp. 9.657.858.093,- (Diskanla Kab. Indramayu, 2022).

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pengembangan ekonomi perikanan terintegrasi, meliputi produksi, pengolahan, dan pemasaran. Minapolitan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 32/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Minapolitan merupakan manajemen ekonomi kawasan berbasis komoditas perikanan unggulan dengan fokus pelaksanaan di daerah. Setiap kawasan terdiri atas sentra produksi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Persyaratan yang wajib dimiliki daerah, antara lain, rencana induk minapolitan, penetapan lokasi dan komoditas unggulan, kelompok kerja

lintas dinas, infrastruktur dasar, unit pengolahan ikan, dan keamanan. Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan melalui berbagai kebijakan, antara lain adalah dengan ditetapkannya Konsepsi Minapolitan.

Konsepsi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Minapolitan didefinisikan sebagai sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya.

Dengan demikian pada dasarnya Kawasan Minapolitan merupakan kawasan dengan pusat kegiatan utama ekonomi yang memanfaatkan, mengelola dan membudidayakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta mempunyai keterkaitan fungsional dengan sistem permukimannya yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menumbuhkan daya saing regional.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Oleh karena itu dalam aplikasinya, kegiatan wisata bahari yang memanfaatkan sumber daya ikan dapat dikembangkan ke arah minawisata.

Konsep minawisata adalah pemanfaatan kawasan wisata dengan pengembangan produksi perikanan untuk mencapai ketertarikan masyarakat pengguna akan pengembangan perikanan pada kawasan wisata tersebut (Dermawan dan Aziz, 2012). Dengan kata lain, minawisata adalah pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada suatu wilayah tertentu (Kasnir, 2011). Erlend et al. (2011) menjelaskan bahwa pengembangan wisata perikanan atau minawisata dapat meningkatkan keuntungan ekonomi dalam

skala lokal sehingga dapat menjadi alternatif bentuk wisata di kawasan pesisir dan laut.

Minawisata (mina= perikanan, wisata= pariwisata) adalah pendekatan pengelolaan terpadu yang berbasis konservasi dan dengan menitikberatkan pada pengembangan perikanan dan pariwisata bahari (Booklet DKP 2007). Minawisata juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada wilayah tertentu.

Terdapat empat arahan aktivitas pada kegiatan minawisata, yaitu wisata mina; wisata konservasi dan pendidikan lingkungan, wisata bahari; dan wisata kuliner. Wisata mina berbasis perikanan dan kombinasinya dapat berupa pengembangan wisata budidaya laut seperti melihat proses budidaya ikan, memberi makan ikan dan memanen ikan (Agrozine, 2021).

Terakhir adalah wisata kuliner dapat dilakukan seperti kuliner perikanan dapat berupa menikmati beragam makanan produk perikanan, memasak sendiri ikan hasil tangkapan, mengamati dan praktek membuat makanan olahan dari ikan, rumput laut dan buah mangrove, misalnya: kerupuk ikan, manisan rumput laut, otak-otak, abon ikan, dan beragam makanan dari buah mangrove.

Beberapa hasil kajian tentang minawisata (Kasnir, 2011; Ferter, 2013; Volstad et al., 2011; Strehlow, 2012), menjelaskan bahwa diperlukannya beberapa skenario pengelolaan di dalam pengembangan wisata perikanan berdasarkan daya dukung dan potensi sumber daya alam yang tersedia agar tercapainya konsep pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang sejalan dengan pengembangan kawasan minapolitan di Indonesia sebagai berikut. Penelitian pertama yakni Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Potensi Wisata Perikanan di Kota Serang (Studi Kasus: Pelabuhan Karangantu), oleh Deasy Olivia, Kelvin Pratama Sanri, dan Maria Gracia Heidi (2019) dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Sains dan Teknologi Pradita, Tangerang, Indonesia. Tulisan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Perbedaannya pada lokasi penelitian

di kawasan Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten.

Penelitian kedua berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Usaha Penggaraman, oleh Mei Dwi Erlina dan Manadiyanto (2012) dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pendekatan penelitian yang digunakan berupa studi kasus pada 19 lokasi Kabupaten/Kota dengan merumuskan strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis usaha penggaraman menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Perbedaannya pada lokasi penelitian di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ketiga dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, oleh Yagus, Achmad Djumlani, dan Syahrani (2015). Penelitian memiliki persamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya pada lokasi yang diteliti yakni Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau.

Penelitian keempat yakni Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, oleh Darmawan L Cahya dan Muhamad Daniel Mareza (2013) dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa Unggul. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya pada lokasi yang digunakan yakni di Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian kelima berjudul Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara, oleh Thomas Agung Bayu Wicaksono, Zainal Hidayat, dan Dewi Rostyaningsih (2013). Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal metodenya yakni deskriptif kualitatif, adapun perbedaannya pada lokasi penelitiannya terletak di Rajapurbawa, Kabupaten Banjarnegara.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, pada umumnya persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada metode dan lokasi penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan berupa studi kasus. Penelitian studi kasus dan lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu. Studi kasus atau case study merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu kasus, gejala sosial, atau unit sosial tertentu yang spesifik. Kasus dalam hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah konsep, aktivitas, waktu, benda (hasil karya seseorang), kebijakan, kelas sosial, organisasi, wilayah, negara, atau fenomena lain yang spesifik (Sudaryono, 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah: "penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah".

Informan yang dipilih merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi maupun kondisi latar dari objek penelitian. Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah: a) Informan Kunci (Key Informan) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama (Richard B. Robinson, 2014). Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber ataupun objek yang diteliti, dalam hal informan yang dipilih adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Indramayu, Bappeda-Litbang Indramayu, Camat Losarang, Kepala Desa Krimun, dan Kepala Desa Cemara Kulon; b) Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan "aktor utama" dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama

adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Maka informan ini adalah Camat Losarang, Kepala Desa Krimun, dan Kepala Desa Cemara Kulon; dan c) Informan pendukung sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan dalam memperoleh informasi tambahan dari penelitian, ini bisa didapatkan dari organisasi kemasyarakatan, pengusaha atau pelaku usaha setempat dan aparat desa setempat.

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive (memilih informan yang benar-benar mengetahui masalah yang diteliti) dan teknik bola salju (informan yang didapat dari informan sebelumnya).

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini meliputi: a) Studi kepustakaan yang menurut M. Nazir yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah; b) Studi lapangan yang dilakukan dengan teknik observasi dengan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, wawancara yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok jika tujuannya menghimpun dari kelompok organisasi masyarakat yang ada (Sudaryono, 2021), dan dokumentasi yang menurut Sugiyono (2016) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Hal ini senada dengan pernyataan Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2016)) menyatakan bahwa foto merupakan dokumen perolehan data yang dapat digunakan dalam memperoleh informasi, baik yang didapatkan dari hasil orang lain maupun oleh peneliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik interactive model, yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh

di lapangan, sehingga mencapai suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Selanjutnya, proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Andi Prastowo, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan menggunakan teori implementasi Edwards III yang melihat implementasi kebijakan publik berdasarkan aspek-aspek komunikasi kebijakan, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam proses implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sebagai potensi minawisata.

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107° 51' sampai dengan 108° 32' Bujur Timur dan 06° 13' sampai dengan 06° 40' Lintang Selatan (Gambar 1). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indramayu memiliki batas-batas: Utara – Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon; Barat – Kabupaten Subang; Timur – Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan dengan 317 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 2.099,42 km² (BPS-Indramayu, Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2022, 2022). Secara topografi sebagian besarnya merupakan dataran dengan kemiringan rata-rata 0 – 2%, keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Luas wilayah Kabupaten Indramayu kurang lebih 209,94 ha, terdiri dari 115.897 km² tanah sawah dan 94.045 km² tanah kering/darat. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa

dengan panjang garis pantai 147 Km. Jarak terpanjang Kabupaten Indramayu menurut garis lurus adalah dari arah barat ke timur sepanjang 70 km dan utara ke selatan sepanjang 40 km, sedangkan jarak Kabupaten Indramayu ke ibukota Jakarta 207 km, Bandung 180 km, dan Cirebon 56 km ((DPMPTSP, 2020).



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Indramayu
Sumber: BPS-Indramayu, Kabupaten Indramayu 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu pada akhir tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.709.994 jiwa. Sedangkan pada akhir Tahun 2018 angka tersebut telah berubah menjadi 1.719.187 jiwa, keadaan ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 9.193 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten indramayu Tahun 2017 - 2018 sebesar 0,54 %. Kabupaten Indramayu telah dikenal tidak hanya sebagai lumbung padi Jawa Barat tetapi dikenal juga sebagai Kota Mangga. Dengan adanya kilang minyak Balongan yang beroperasi sejak 1997, kegiatan ekonomi yang terkait dengan unsur minyak dan gas bumi telah memainkan peranan penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Indramayu. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indramayu Tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 74.588,71 juta rupiah. Sedangkan di sisi konstan yang tidak dipengaruhi oleh faktor inflasi mencapai 58.238,9 juta rupiah. Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 399.793.938.000,- yang didukung oleh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.173.800.595.000,- (DPMPTSP, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jawa Barat 2009-2029, Kabupaten Indramayu diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan kegiatan utama pada pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industri, pertambangan terutama minyak dan gas (Kemenperin-RI, 2016). Kabupaten Indramayu termasuk dalam kawasan Segitiga Rebana yang memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebesar 20.000 Ha, diantaranya adalah KPI Kecamatan Losarang 4.523 ha, terdapat Industri Keramik, Industri Cover Jok Mobil, Industri Pengolahan Biji Plastik, Industri Garam Beryodium dan Garam Industri, Industri Kimia Organik Sintesis dan Industri Pengolahan Garam. Potensi perikanan berupa garis pantai 147 km yang membujur dari Kecamatan Sukra sampai Krangkeng dan jumlah penduduk dengan mata pencaharian bidang perikanan. Luas perairan laut mencapai 70.000 ha sangat berpotensi terhadap hasil tangkapan ikan laut dan memiliki nilai ekonomis penting. Produksi perikanan laut dari kabupaten ini adalah terbesar di Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, potensi pengolahan ikan laut yang ada diantaranya rajungan, bawal, cumi-cumi, sirip hiu, kakap merah, tulang hiu, kepiting, tenggiri, teri, jambal roti, ebi dan lain-lain merupakan hasil sampingan dari masyarakat Indramayu. Sedangkan potensi perikanan ikan darat terdapat pada udang vaname, udang windu, bandeng, lele, dan gurame. Kabupaten Indramayu memiliki 423 unit pengolahan hasil perikanan, dengan jenis pengolahan meliputi ikan asin, terasi, penggaraman, pengalengan, pemindangan, pengasapan dan fermentasi. Di Kabupaten Indramayu terdapat 14 TPI dan penyumbang terbesar produksi dari TPI Karangsong karena area tangkapnya dari Papua dan Maluku. Produk unggulan yang ada di Kabupaten Indramayu yaitu Ikan Kakap Merah, Kanang, tongkol dan Cumi yang memiliki nilai produksi 2.883.181.087 ton (DPMPSTP, 2020).

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagai konsep pembangunan wilayah berbasis kelautan dan perikanan melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan untuk mendukung pengembangan wilayah berbasis sumberdaya perikanan meliputi Minapolitan Ujunggebang di Kecamatan Sukra, Minapolitan Eretan di Kecamatan Kandanghaur, Minapolitan Dadap di

Kecamatan Juntinyuat, Minapolitan Karangsong di Kecamatan Indramayu, dan Minapolitan Cemara di Kecamatan Losarang (Pemerintah Indramayu, 2021).

Potensi pariwisata yang dimiliki cukup potensial karena kekayaan alam, tradisi, seni dan budaya serta sejarah. Letak Indramayu yang berada di pesisir pantai memiliki daya tarik tersendiri sebagai daerah wisata. Beberapa potensi pariwisata telah dikembangkan namun masih banyak yang belum dikembangkan secara maksimal padahal potensi-potensi tersebut merupakan aset daerah sebagai dayatarik investasi di bidang pariwisata. Beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan adalah: (1) Wisata Alam (Pulau Biawak, Pantai Tirtamaya, Pantai Glayem, Pantai Balongan Indah, Pantai Eretan, Waterpark Bojongsari, Situ Bolang, Situ Brahim, Pantai Karangsong dan Ekowisata Hutan Mangrove, Waduk Cipancuh, serta Koloni Kera Banjar); (2) Wisata Agro (Hutan Kayu Putih, Agrowisata Mangga); (3) Wisata Ziarah (Situs Makam Raden Arya Wiralodra, Makam Selawe dan Makam Buyut Tambi); (4) Wisata Rohani (Islamic Center Indramayu, Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun); (5) Wisata Kota (Sungai Tjimanoeck, Alun-alun Indramayu, Tugu Kijang, Tugu Mangga, Masjid Agung, dan Kilang Minyak Balongan); (6) Wisata Seni dan Budaya (Nadran, Ngarot, Jaringan, Ngunjung, Mapag Sri, Sedekah Bumi, Tarling, Dermayon, Wayang Golek Cepak, Sitren, Kuda Lumping dan Berokan); dan (7) Wisata Kuliner (Pindang Gombyang, Pedesan Entog, Dodol Mangga, Sirup Mangga, Manisan Mangga, Keripik Mangga, Soto, Burbacek/Bubur Rumbah Cecek, Rumbah, Koci, Nagasari, Nasi Lengko, Rempeyek Mangrove, Minuman Mangrove dan sebagainya).

Dari sisi kebencanaan, secara geologi maupun berdasarkan topografi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap beberapa jenis bencana, diantaranya adalah banjir, gerakan tanah, dan abrasi. Untuk potensi bencana kegempaan baik tektonik maupun vulkanik relatif kecil, hal ini disebabkan karena letak Indramayu yang berada di pantai utara Jawa, dan relatif jauh dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang berada pantai selatan Jawa serta jauh dari lokasi keberadaan gunung berapi. Penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh intensitas curah hujan yang

Anis Khoirunnisa, dkk | Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Potensi Minawisata di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu

tinggi dengan durasi di atas normal sehingga menghasilkan air limpasan yang melebihi daya dukung sistem drainase, perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali serta kondisi geologi dan morfologi lahan terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu potensi banjir juga terjadi pada daerah sepanjang Sungai Cimanuk, terutama pada daerah-daerah dengan kondisi tanggul yang kritis (Kemenperin-RI, 2016).



Gambar 2. Peta Rawan Bencana Kabupaten Indramayu

Sumber: Kemenperin-RI, 2016

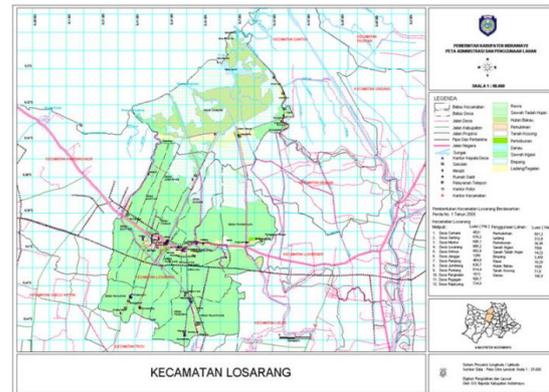
Kecamatan Losarang

Penelitian dilakukan di salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu, yakni Kecamatan Losarang, yang juga ditetapkan sebagai kawasan minawisata.

Penelitian dilakukan di salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu, yakni Kecamatan Losarang (Gambar 4), yang juga ditetapkan sebagai kawasan minawisata.

Losarang adalah salah satu nama Kecamatan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayahnya adalah 111,61 km² mencakup daratan seluas 87,74 km² dan perairan 23,87 km². Jumlah penduduk sebanyak 59.064 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 29.726 jiwa dan perempuan sebanyak 29.338 jiwa. Wilayah kerja di Kecamatan Losarang mencakup 12 desa, diantaranya Desa: Cemara Kulon, Jangga, Jumbleng, Krimun, Losarang, Muntur, Pangkalan, Pegagan, Puntang, Rajaiyang, Ranjeng, dan Santing. Wilayah Kecamatan Losarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kecamatan Lohbener di timur, Kecamatan Kandanghaur di barat, dan Kecamatan Terisi di selatan. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Losarang antara lain: petani padi, penambak lele, penambak udang, dan penambak garam (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Indramayu (Statistics of Indramayu), 2020).



Gambar 3. Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan Losarang

Sumber: BPS-Indramayu, Kecamatan Losarang Dalam Angka 2020



Gambar 4. Kantor Kecamatan Losarang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu (Statistics of Indramayu), 2020

Dalam kaitan pengembangan wilayah di Kecamatan Losarang, Kementerian Perindustrian RI, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri sejak 2016, pemilihan lokasi yang tepat bagi pembangunan kawasan industri, akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan industri pada masa yang akan datang. Pengembangan kawasan industri sebelum membangun kawasan industrinya harus memilih lokasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan investor pada umumnya. Berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan karena sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Selain itu dengan dikembangkannya suatu kawasan industri juga akan memberikan dampak terhadap beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Kriteria dasar penilaian lokasi kawasan industri mengacu kepada Permenperin Nomor 40 Tahun

2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Kemenperin-RI, 2016). Hasil penilaian dan studi kelayakan dari lima alternatif lokasi industri, maka lokasi Kawasan Industri Kecamatan Losarang memiliki nilai tertinggi. Adapun kendala utama untuk merealisasikan lokasi ini menjadi kawasan industri harus didukung oleh pengesahan RDTR Losarang yang didalamnya mengakomodir rencana lokasi Kawasan Industri atau mengakomodir lokasi ini dalam peninjauan kembali (PK) atas RTRW Kabupaten Indramayu (Kemenperin-RI, 2016).

Desa Cemara Kulon

Desa Cemara Kulon merupakan hasil pemekaran Desa Cemara Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan diresmikan pada Tanggal 21 Maret 2011 oleh Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah sekaligus pelantikan PJ. Kuwu Desa Cemara Kulon yaitu Sudarno, bertempat di Balai Desa Cemara Kulon.

Desa Cemara Kulon berada di antara sungai-sungai besar yang merupakan daerah aliran sungai pembuangan ke laut, di sebelah barat ada Kali Cilet, sebelah timur ada Kali Pangkalan, di tengah ada Kali Tuan dan Kali Krimun. Hal ini yang membuat rawan banjir apabila ada tanggul kali yang jebol atau luapan air pasang laut tetapi disisi lain sangat menguntungkan untuk meningkatkan potensi perempangan atau usaha garam. Kebudayaan Desa Cemara Kulon yang ada sejak dulu adalah tradisi Nadran atau Pesta Laut, Sedekah Bumi, Tradisi Ruwat, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam yang menjadi andalan Desa Cemara Kulon yaitu ikan, udang, garam dan hasil tangkapan dari laut.

Desa Cemara Kulon telah resmi dimekarkan, dari Desa Cemara sebagai desa induk yang masuk ke wilayah Kecamatan Cantigi, sedangkan Desa Cemara Kulon sebagai desa hasil pemekaran masuk ke Kecamatan Losarang. Desa Cemara Kulon terletak pada Garis Bujur antara 1070 52' – 1080 36' BT dan di antara 60 14' - 60 40' LS dengan luas wilayah 1.729 ha yang terdiri dari tiga dusun dengan tiga RW dan sembilan RT dengan batas wilayah administratif sebagai berikut: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; (2) Sebelah Timur dengan Desa Cemara, Kecamatan Cantigi; (3) Sebelah Selatan dengan Desa

Pangkalan, Desa Jumbleng, Desa Losarang dan Desa Krimun, Kecamatan Losarang; dan (4) Sebelah Barat dengan Desa Santing, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur. Gambar 4.7 menampilkan peta wilayah administratif Desa Cemara Kulon.

Wilayah Desa Cemara Kulon seluas 1.729 ha, peruntukan tambak saat ini yang terdiri atas milik Perhutani, Pangonan, Tanah Milik, Lahan Garam sejumlah 1.700 ha, pekarangan pemukiman sejumlah 9 ha, tanah tegalan 15 ha, dan hutan negara 5 ha. Tiga dusun (blok) dengan tiga RW di Desa Cemara Kulon yaitu Blok I (RW. 01 terletak di sebelah barat), Blok II (RW. 02 terletak di sebelah tengah), dan Blok III (RW. 03 terletak di sebelah timur). Struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas : (1) Pimpinan adalah kepala desa; (2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa; (3) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan, diantaranya urusan pemerintahan, keuangan, kesejahteraan rakyat, umum, urusan ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, ditambah urusan wilayah; dan (4) Unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerja atau yang disebut Kepala Dusun. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kondisi musim di Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu terdapat 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan, dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bercocok tanam khusus bagi warga yang hanya mengandalkan kebun tadah hujan untuk kegiatan bercocok tanam, sedangkan pada musim kemarau masyarakat lebih cenderung bertani garam.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Losarang sebagai Potensi Minawisata

Kebijakan penetapan kawasan minapolitan adalah kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Salah satu kebijakan dalam urusan pemerintahan terkait kelautan dan perikanan ini adalah penetapan kawasan minapolitan, untuk daerah-daerah yang memiliki potensi perikanan. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kawasan Minapolitan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No. PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. Kawasan Minapolitan tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan maka ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Kawasan minapolitan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan adalah sejumlah 197 wilayah kabupaten/kota pada 33 provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan menteri tersebut. Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kawasan minapolitan khususnya di Provinsi Jawa Barat ditetapkan di 11 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Karawang, Bogor, Garut, Cirebon, Kota Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Bekasi, Sukabumi, dan Tasikmalaya.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu bersama DPRD Kabupaten Indramayu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu Tahun 2011–2031 yang di dalamnya mencakup penetapan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu. Peraturan daerah yang dimaksud sebagai produk kebijakan yang berkait Kawasan minapolitan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW terutama Pasal 1, Pasal 5, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 49.

Aspek-aspek dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan menjadi Minawisata di Kecamatan Losarang

1. Aspek Ekonomi dalam Urusan Perikanan dan Kelautan
Terdapat beberapa masalah pokok dalam aspek perekonomian yang bersumber dari perikanan dan kelautan yang berkait dengan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yaitu rendahnya produksi olahan hasil

perikanan, produksi perikanan budidaya belum optimal, produksi perikanan tangkap belum optimal, dan produksi garam rakyat belum optimal.

2. Aspek Ekonomi dalam Urusan Pariwisata
Terdapat masalah yang paling pokok dalam aspek ekonomi dalam urusan pariwisata yang berkenaan dengan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni rendahnya kunjungan wisatawan.
3. Aspek Infrastruktur dalam Urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Masalah pokok lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas lingkungan hidup.
4. Aspek Infrastruktur dalam Urusan Pekerjaan Umum
Terdapat masalah yang paling pokok dalam aspek infrastruktur dalam urusan pekerjaan umum (PU) yang berkenaan dengan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni kurangnya daya dukung infrastruktur wilayah.
5. Aspek Infrastruktur dalam Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan
Terdapat masalah pokok dalam aspek infrastruktur dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang berkenaan dengan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni kurang optimalnya kesesuaian tata ruang dan penatausahaan pertanahan.
6. Aspek SDM dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Terdapat masalah pokok dalam aspek sumberdaya manusia dalam urusan kepemudaan dan olahraga yang berkenaan dengan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
7. Aspek Tata Kelola dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Terdapat masalah pokok dalam aspek tata kelola dalam urusan pemberdayaan masyarakat yang berkenaan dengan kebijakan pengembangan kawasan

minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni rendahnya tingkat kemandirian desa.

8. Aspek Tata Kelola dalam Urusan Kepegawaian

Terdapat masalah pokok dalam aspek tata kelola dalam urusan kepegawaian sebagai bagian dari unsur pelaksana kebijakan, terutama kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni profesionalitas aparat sipil negara (ASN) masih perlu ditingkatkan.

9. Aspek Tata Kelola dalam Urusan Keuangan

Terdapat masalah pokok dalam aspek tata kelola dalam urusan keuangan sebagai bagian dari unsur sumberdaya implementasi kebijakan, terutama kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

10. Aspek Tata Kelola Dalam Urusan Pemerintahan

Terdapat beberapa masalah pokok dalam aspek tata kelola dalam urusan pemerintahan sebagai unsur penting pelaksana kebijakan, terutama kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan.

11. Aspek Tata Kelola dalam Urusan Komunikasi dan Informasi

Terdapat masalah pokok dalam aspek tata kelola urusan komunikasi dan informasi sebagai unsur penting dalam sosialisasi kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata, yakni penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang masih perlu ditingkatkan.

Komunikasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Losarang sebagai Potensi Minawisata

Satu di antara faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan implementator untuk menyampaikan kebijakan

yang akan digulirkan kepada jajaran, stakeholder dan publik sebagai penerima manfaat kebijakan. Komunikasi implementator kepada jajaran dan stakeholder, paling tidak menyangkut 3 hal, yaitu bagaimana pelaksanaan sosialisasi kebijakan, bagaimana konsistensi implementator dalam menyampaikan kebijakan, dan bagaimana pemahaman implementator dan seluruh jajarannya terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.

Pelaksanaan implementasi kebijakan diawali dengan pemerataan informasi kepada pihak-pihak yang menjadi implementator kebijakan. Pengetahuan akan adanya kebijakan mendorong kesadaran dan tanggungjawab kepada pihak-pihak implementator untuk segera dapat merealisasikannya. Sosialisasi juga diperlukan untuk mengurasi terjadinya distorsi dalam implementasi kebijakan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu sosialisasi kebijakan kepada pihak-pihak yang masuk pada implementator dan pendukungnya menjadi sebuah keniscayaan.

Pengembangan kawasan minapolitan Losarang sebagai potensi minawisata secara kelembagan, berkait secara langsung dengan tiga instansi dinas di lingkup Kabupaten Indramayu, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) serta Pemerintah Kecamatan. Masing-masing dinas memiliki peran dalam pengembangan kawasan ini sesuai dengan tupoksinya.

Dari aspek pariwisata, menurut Rian Sugiarto, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Disparpora Kabupaten Indramayu, bahwa pengaturan pariwisata berpayung pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012. Dari pemetaan wilayah tersebut, secara khusus pengembangan pariwisata di Indramayu, diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2018-2025. Dalam perda tersebut secara eksplisit sudah menyebutkan tentang pengembangan minawisata sentra garam untuk Kecamatan Losarang. Di samping itu poin-poin tentang rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) 2016-2021 telah terakomodir dalam perda tersebut. Leading

sector pengembangan kawasan pariwisata di Indramayu adalah di bawah tanggungjawab Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata. Pada tingkat pelaksana ditangani oleh Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Para pelaku usaha pendukung pariwisata seperti pemilik hotel dan restoran pun belum mengetahui kebijakan tentang pengembangan kawasan minawisata ini. Sebagaimana diungkapkan Ancha, pemilik penginapan Mawar Indah Losarang, bahwa ia tidak mengetahui adanya kebijakan pengembangan minawisata di daerahnya. Pemilik Rumah Makan Minang Raya Padang Losarang, Robi, juga belum mengetahui rencana pengembangan minawisata di daerahnya. Saat ini, usaha rumah makan, hanya sekedar bertahan hidup. Konsumen hanya berasal dari lingkungan. Konsumen dari tamu-tamu yang lewat sedikit sekali. Apalagi setelah dibukanya jalan tol Cipali. Jika ada destinasi wisata di Losarang, akan mengundang para pengunjung, yang sudah barang tentu berpeluang meningkatkan jumlah pembeli.

Sosialisasi kebijakan berkait pengembangan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata dinilai sudah dilakukan, meskipun baru berupa pembekalan-pembekalan, menurut Titan. Sebenarnya terkait dengan pengembangan kepariwisataan, peta sudah ada berupa perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) 2018-2025. Hanya butuh untuk mengikuti peta jalan yang sudah ada tersebut. Namun masih didapati peta jalan itu belum bisa dikatakan sustainable. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu harusnya bisa jadi fasilitator pengembangan kawasan, khususnya kawasan pariwisata.

Mengkomunikasikan kebijakan yang akan diimplementasikan, tidak cukup dilakukan sebatas sosialisasi, tetapi perlu dilakukan secara jelas, terperinci dan konsisten. Oleh karena itu implementator kebijakan perlu melakukan berbagai upaya untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak-pihak terkait, sehingga benar-benar dipahami oleh para pelaksananya. Demikian pula halnya dalam pengembangan kawasan minawisata, perlu komunikasi yang intensif dan konsisten.

Implementator kebijakan mesti memahami apa yang harus dilakukan dan dimana kebijakan akan dilaksanakan. Pemahaman ini juga perlu didukung oleh pemahaman implementator terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan dapat teralisasi dengan baik

Diskanla sebagai salah satu implementator kebijakan, mendasarkan tugas dan fungsinya pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 Tahun 2022. Menurut Oni, ruang lingkup tugas Diskanla adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berkait dengan pengembangan kawasan minapolitan di Indramayu, Diskanla memiliki kewenangan sebagai pembina, fasilitator dan pengawas. Sebagai pembina, Diskanla dengan berbagai perangkat yang dimilikinya, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat, pelaku usaha, kelompok-kelompok, terkait dalam mengembangkan potensi wilayah di bidang kelautan dan perikanan, termasuk yang sudah diproyeksikan untuk pariwisata. Sebagai fasilitator, Diskanla menjembatani hajat masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengembangkan wiyahnya kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada instansi terkait, seperti pihak swasta, BUMN, kementerian-kementerian. Memfasilitasi dalam penyerapan program pemerintah pusat bagi para nelayan, seperti dalam memperoleh kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Sebagai Pengawas, Diskanla melakukan pengawasan terhadap berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan masyarakat maupun pengusaha dalam bidang kelautan dan perikanan, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik yang dikeluarkan daerah maupun pusat.

Sumberdaya Berkait Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Losarang sebagai Potensi Minawisata

Unsur yang terpenting dalam implementasi kebijakan publik adalah sumber daya, baik berkait dengan sumberdaya manusia, finansial, maupun sumber daya alam. Aspek sumberdaya manusia, bukan hanya aspek personalnya, tetapi perannya yang mencakup kewenangan, kemampuan berbuat, kualitas perbuatan, dan kuantitas personalnya. Sumberdaya finansial berupa dana penyelenggaraan implementasi kebijakan dan sumber daya alam berupa sarana prasarana penunjangnya.

Menurut Muhaemin, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik, pemerintah daerah perlu mengajak unsur 3P, yaitu privat, publik, dan partnership. Yang sedang dihadapi merupakan tantangan yang besar, terutama dalam upgrade diri (upskill) dan kuncinya ada di Bupati. Dari sisi infrastruktur terdapat kendala terkait fasilitas jalan. Juga dibutuhkan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan. Dari sisi sumberdaya manusia, masih menurut Muhaemin, di Kabupaten Indramayu ini juga menjadi bagian dari kendala. Istilah. Dalam bahasa sunda babaliuet.

Implementasi kebijakan publik diperlukan sumberdaya manusia sebagai implementator yang memiliki kewenangan untuk menterjemahkan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Kemampuan menterjemahkan sebuah kebijakan diperlukan, agar dalam realisasinya mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Oleh sebab itu implementator mesti mendapatkan kewenangan yang cukup untuk menterjemahkan kebijakan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pelaksanaan implementasi kebijakan publik dihajatkan sumberdaya informasi yang dapat menterjemahkan kebijakan agar dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Sumberdaya informasi ini dapat berupa personal atau media informasi.

Kualitas aparat pelaksana diperlukan untuk dapat menterjemahkan secara tepat kebijakan yang digulirkan. Kualitas aparat pelaksana akan menentukan tingkat distorsi informasi sampai kepada pengguna layanan publik. Karenanya pada struktur dinas dan UPTD terdapat tenaga-tenaga ahli yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional lembaga.

Dinas sebagai implementator kebijakan, di samping harus memiliki tenaga-tenaga ahli yang berkualitas, juga secara kuantitas diperlukan tenaga-tenaga teknis yang menjalankan tugas pembimbingan dan pelayanan kepada publik.

Impelementasi kebijakan memerlukan sejumlah dana, baik untuk biaya penyelenggaraan program maupun untuk biaya pegawai. Karenanya salah satu kewenangan dinas adalah merumuskan dan mengajukan penganggaran. Adapun keputusan penganggarnya ditetapkan Bupati.

Kuangan daerah memiliki komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya dalam menyeimbangkan ketiga komponen

tersebut. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Indramayu P., 2021).

Keberhasilan implementasi kebijakan, salah satunya ditentukan oleh sarana prasarana yang dimiliki. Karenanya, salah satu hal yang perlu diupayakan oleh para implementator adalah mewujudkan sarana prasarana pendukung sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik. Sarana prasarana dapat berupa potensi alam yang sudah tersedia atau sesuatu yang dibuat dan diciptakan manusia. Adanya kecukupan sarana prasarana, akan membuat publik merasa terlayani sehingga partisipasinya pun akan meningkat.

Dalam konteks pengembangan kawasan minapolitan di Indramayu, banyak tersedia potensi-potensi alam yang mendukung. Dengan panjang pantai 147 km, Indramayu memiliki prospek yang baik dalam pengembangan ekonomi kelautan (blue ekonomi). Laut dengan segala potensinya merupakan masa depan Bangsa Indonesia. Maka tidak heran, dengan potensi itu sektor perikanan dan kelautan menjadi andalan perekonomian masyarakat Indramayu. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, sektor perikanan dan kelautan Indramayu memiliki kontribusi yang sangat besar. Berdasarkan data Diskanla tahun 2021, produksi ikan tangkap Indramayu berkontribusi 62,59% dari total produksi Jawa Barat, produksi udang vaname 71,97%, udang windu 55,41%, bandeng 49,02%, lele 30,79%, nila 19,27%, dan gurame 38,58%. Dari data tersebut menunjukkan seluruh komoditas ikan, baik ikan tangkap maupun budidaya, Indramayu menempati ranking 1 di Jawa Barat.

Disposisi atau Karakteristik Birokrasi Berkait Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Losarang sebagai Potensi Minawisata

Karakteristik pemegang birokrasi lembaga pelaksana kebijakan memiliki peran kunci dalam mengoptimalkan implementasi suatu kebijakan publik. Karena itu diperlukan attitude

yang baik berupa sifat, disiplin dan motivasi dari para implementator kebijakan.

Dalam merealisasikan kebijakan, diperlukan dukungan berupa karakteristik positif dari para implementator dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sikap positif implementator ini sangat penting karena akan dapat mendorong masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pelayanan publik dapat berupa kemudahan dalam mengakses informasi, pengurusan berbagai perizinan, konsultasi dan komunikasi dan lain-lain.

Disiplin merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Disiplin diwujudkan dalam bentuk komitmen para implementator kebijakan dalam mewujudkan program yang sudah direncanakan sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan problematika.

Implementasi sebuah kebijakan dapat secara optimal manakala para implementator memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Implementator menunjukkan sikap baik, memiliki perspektif yang sesuai dan mendukung kebijakan dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Sikap ini diarahkan bukan saja dalam merealisasikan kebijakan yang dicanangkan, lebih jauh dalam membaca segala potensi yang dimiliki wilayah kerjanya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan daerahnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam dan budaya masyarakatnya.

Struktur Birokrasi Berkait Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Losarang sebagai Potensi Minawisata

Implementator kebijakan publik akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik manakala memiliki struktur birokrasi yang baik. Struktur birokrasi yang dimaksud menyangkut pembagian kerja, sistem kerja, prosedur, dan koordinasi organisasi.

Implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Karena diperlukan pembagian kerja yang jelas yang diwujudkan struktur organisasi. Kejelasan struktur organisasi dan pembagian kerja akan memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada publik.

Organisasi yang baik diwujudkan dengan sistem kerja yang baik. Organisasi atau lembaga yang memiliki sistem kerja yang baik akan dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan baik pula. Sistem kerja ini dirumuskan dalam bentuk tugas pokok, fungsi dan peran para implementator sesuai dengan struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan untuk pelayanan publik.

Struktur organisasi atau Lembaga yang telah memiliki tupoksi, dalam aplikasi kerjanya perlu dibuat prosedur yang standar, sehingga siapapun yang menjabat atau ketika terjadi rolling jabatan, pejabat baru dapat menjalankannya dengan baik. Prosedur standar tersebut dirumuskan dalam sebuah pedoman kerja atau dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan SOP para implementator dapat menyeragamkan tindakannya dalam struktur organisasi yang kompleks dan tersebar luas dalam suatu wilayah tertentu.

Menggerakkan organisasi yang kompleks, berjenjang dan tersebar di tempat yang berbeda, tidak cukup dengan prosedur yang baku dan kaku. Terlebih ketika variabel kegiatan yang cukup beragam diperlukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu implementator harus mampu mengkoordinasikan struktur organisasi beserta lembaga turunannya dengan baik. Kondisi ini menuntut adanya fleksibilitas yang tinggi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan acuan dasar lembaga.

Koordinasi lembaga tingkat nasional seperti BRIN, menurut Titan, melalui kegiatan riset dan inovasi di daerah, dalam aspek riset pengembangan mestinya saat di tingkat pusat sudah ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dapat diinisiasi untuk pengembangan atau perwujudan badan riset inovasi daerah (BRIDA) Indramayu. Saat ini ada upaya-upaya riset dan inovasi BRIN di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Losarang, berupa upaya melakukan rekayasa iklim atau cuaca. Hal ini juga patut dinilai sebagai upaya untuk menuju pada perbaikan kualitas lingkungan dalam hal ini adalah iklim atau cuaca wilayah tersebut.

PENUTUP

Implementasi kebijakan kawasan minapolitan sebagai potensi minawisata di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ternyata belum optimal. Pada dasarnya kebijakan pengembangan kawasan tersebut

sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) tahun 2018-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) Kabupaten Indramayu 2021-2026, namun belum ada penjabaran dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) Kawasan Minapolitan sesuai pedoman Permen KKP no. 18 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RIP Kawasan Minapolitan. Terdapat faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program pengembangan kawasan minapolitan di Losarang Kabupaten Indramayu. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat dalam mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yakni pemerintah daerah menuangkannya dalam rencana pembangunan daerah dan mengkomunikasikannya kepada instansi terkait sehingga terwujud infrastruktur pendukung berupa jalan yang cukup baik, serta pemberian bantuan pengembangan produksi garam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dermawan dan Arif Miftahul Aziz. (2012). *Pengembangan Minawisata Pulau-Pulau Kecil untuk Mendukung Implementasi Blue Economy*. KONAS VIII Pengelolaan Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil. <https://adoc.pub/pengembangan-minawisata-pulau-pulau-kecil-untuk-mendukung-im.html>
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu (Statistics of Indramayu). (2020). *Kecamatan Losarang Dalam Angka 2020, 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. <https://indramayukab.bps.go.id/publication/2020/09/28/a9d0de726443ca2408afa31e/kecamatan-losarang-dalam-angka-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu (Statistics of Indramayu). (2022). *Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/kabupaten-indramayu-dalam-angka>
- Darmawan Listya Cahya & Muhamad Daniel Mareza. (2013). Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Planesa (Planologi)*, 4(2), 46–52. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/lanesa/article/view/1898>
- Deasy Olivia, Kelvin Pratama Sanri. & Maria Gracia Heidi. (2019). Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Potensi Wisata Perikanan di Kota Serang (Studi Kasus: Pelabuhan Karangantu). *4 Ruang Kreatif: Gaya Hidup Perkotaan, Ruang Dan Media Sosial, Kampung Siber, Wisata Kreatif*, 4, 419–431. <https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/133>
- Diskanla Kab. Indramayu. (2022). *Dinas Perikanan Indikator Makro Pembangunan Perikanan dan kelautan Kab. Indramayu 2016-2021*. Dinas Perikanan dan Kelautan. <https://diskanla.indramayukab.go.id/renstra-2016-2021-dinas-perikanan-dan-kelautan/>
- DPMPTSP. (2020). *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu*. DPMPTSP-Indramayu. <https://dpmptsp.indramayukab.go.id/>
- Erlend, M. J. (2011). Effects of Fishing Tourism in a Coastal Municipality: A Case Study from Risør Norway. *Journal of Ecology and Society*, 16(3), 11–21.
- Ferter, K. W. (2013). Unexpectedly High Catch-And-Release Rates In European Marine Recreational Fisheries: Implications for Science and Management. *ICES: Journal of Marine Science*, 70, 1319–1329.
- KemenKKP-RI. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024 (Reviu dan Rambu*

Anis Khoirunnisa, dkk | Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Potensi Minawisata di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu

- Penyusunan Renstra). Biro Perencanaan-Setjen KKP.
- Kemenperin-RI. (2016). *Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Indramayu*. Kemenperin-RI.
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mahabi Yudha Negara, Taufik Hery Purwanto; Nurul Khakhim, & Dwi Setyo Aji,. (2021). *Identifikasi Perubahan Garis Pantai Sebagian Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal Melalui Citra Penginderaan Jauh menggunakan Metode Band Rasio* [Universitas Gajah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/201042>
- Mei Dwi Erlina dan Manadiyanto. (2012). Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Usaha Penggaraman. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v2i1.9259>
- Muhammad Kasnir. (2011). Analisis Aspek Ekologi Penatakelolaan Minawisata Bahari di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences*, 16(2), 61–69.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Indramayu. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2025*. Pemkab Indramayu.
- Redaksi Agrozine. (2021). *Minawisata dan Daerah yang Berhasil Menerapkannya*. Agrozine.Id. <https://agrozine.id/minawisata-dan-daerah-yang-berhasil-menerapkannya>
- Richard B. Robinson. (2014). *Manajemen Strategi*. Salemba.
- Strehlow, H. V. (2012). Cod Catches Taken by The German Recreational Fishery In The Western Baltic Sea, 2005–2010: Implications For Stock Assessment And Management. *ICES: Journal of Marine Science*, 69, 1769.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Thomas Agung Bayu Wicaksono, Zainal Hidayat, & Dewi Rostyaningsih. (2013). Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/8900>
- Volstad, J, H., Korsbrekke, K., Nedreaas, K, H., Nilsen, M., Nilsson, G, N. (2011). PenninProbability-Based Surveying Using Self-Sampling To Estimate Catch and Effort In Norway’s Coastal Tourist Fishery. *ICES: Journal of Marine Science*, 68, 1785–1791.
- Yagus, Achmad Djumlani, & Syahrani. (2015). Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform*, 3(1), 222–233. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/564/514>